

**STRATEGI PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI BERBASIS
MASYARAKAT DI KAWASAN KONSERVASI PULAU PASI GUSUNG,
KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

SAPTARIANI PUTRI RIDWAN

P0303215002



**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



**STRATEGI PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT DI
KAWASAN KONSERVASI PULAU PASI GUSUNG, KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Disusun dan diajukan oleh

SAPTARIANI PUTRI RIDWAN

Kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



TESIS**STRATEGI PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI BERBASIS
MASYARAKAT DI KAWASAN KONSERVASI PULAU PASI GUSUNG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Disusun dan diajukan oleh

SAPTARIANI PUTRI RIDWAN
Nomor Pokok P0303215002

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 22 Maret 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

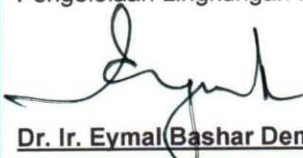
Menyetujui

Komisi Penasehat,


Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA.
Ketua


Dr. Alimuddin Hamzah, M. Eng.
Anggota

Ketua Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup,


Dr. Ir. Eymal Bashar Demmalino, M.Sc.

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,




Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPTARIANI PUTRI RIDWAN

Nomor Mahasiswa : P03003215002

Program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, Maret 2019

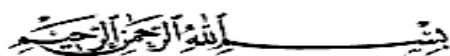
Yang menyatakan,



SAPTARIANI PUTRI RIDWAN



PRAKATA



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. karena hidayah dan taufik-Nya sehingga tesis ini dapat terwujud walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shawalat dan Salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. kepada seluruh keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan tuntunan Syari'at Islam dengan sebaik-baiknya..

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini hambatan akan banyak dilalui dan itu adalah suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila dalam tesis ini banyak dijumpai kesalahan dan kekurangan, baik dari segi gramatika maupun dari segi teknik penulisan. Hal ini disebabkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki masih kurang. Namun segala kemampuan yang ada sehingga segala hambatan dan kesulitan dapat diatasi.

Secara jujur penulis akui bahwa tesis ini, tidak mungkin terselesaikan sebagaimana mestinya jika tidak ditunjang oleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA, sebagai Ketua Komisi Penasihat dan Dr. Ali Hamzah, M.Eng. sebagai Anggota Komisi Penasehat atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan besar terima kasih kepada suami Dhanni Mopilie, S.H., M.H. serta anak-anak terkasih Arinda Salsabila Nadhifa M & Akifa Naila Mopilie beserta seluruh teman-teman di PLH angkatan 2015 yang telah banyak membantu dalam rangka penulisan tesis ini dan yang terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mereka yang namanya tidak tercantum tetapi telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Makassar, 11 Februari 2019

Saptariani Putri Ridwan



ABSTRAK

Saptariani Putri Ridwan. P0303215002. “ Strategi Pengelolaan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat di Kawasan Konservasi Pulau Pasi Gusung. Kabupaten Kepulauan Selayar”. Dibimbing oleh Prof.Dr.Ir Ambo Tuwo. DEA dan Dr. Ali Hamzah. M.Eng

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain zonasi ekowisata bahari yang sesuai di wilayah Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan potensi ekologi yang dimiliki, mengkaji kelayakan ekowisata bahari yang berbasis masyarakat serta membuat strategi pengelolaan ekowisata bahari yang berbasis masyarakat di Pulau Pasi Gusung, Kabupaten Selayar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang berbasis analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) dan dipadukan dengan penelitian kualitatif berdasarkan hasil survey dan wawancara terstruktur yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode AHP dan untuk strategi pengelolaan dengan menggunakan pendekatan SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan potensi ekologi yang dimiliki, desain untuk zonasi ekowisata Pulau Pasi Gusung memenuhi kriteria sesuai atau termasuk kategori S2 untuk dijadikan ekowisata bahari diving dan snorkeling dengan mempertimbangkan beberapa parameter kesesuaian wisata. Pulau Pasi Gusung memiliki kelayakan kondisi biofisik ekosistem terumbu karang untuk pengelolaan ekowisata bahari untuk wisata diving dan snorkeling masih baik. Rerata penutupan karang hidup sebesar 65,25% yang tergolong kategori baik. Strategi utama pengelolaan ekowisata bahari berbasis masyarakat berdasarkan analisis AHP dan analisis SWOT yang memiliki total rasio perbandingan IFE lebih tinggi daripada EFE: 4,98 : 4,32. Hal ini menunjukkan strategi berada pada kuadran I, dengan strategi S-O. Strategi SO meliputi pembentukan struktur pengelola kawasan ekowisata, penyusunan buku panduan pengelolaan berbasis masyarakat, pengembangan industri pariwisata skala rumah tangga, pemetaan sumberdaya, peningkatan kapasitas berupa pelatihan penyelaman untuk masyarakat, serta membangun pusat informasi secara online untuk menambah tingkat kunjungan wisatawan.

Kata kunci: Ekowisata bahari, berbasis masyarakat, ekosistem terumbu karang, analisis GIS, analisis AHP, analisis SWOT, strategi.



ABSTRACT

SAPTARIANI PUTRI RIDWAN. *The management Strategy for Maritime Ecotourism Based on Community in the Conservation Area of Pasi Gusung Island, Selayar Archipelago Regency (supervised by **Ambo Tuwo** and **Ali Hamzah**)*

This research aimed (1) to design the maritime ecotourism zone compatible with Pasi Gusung Island Area, Selayar Archipelago Regency based on the potential of the available ecology; (2) to study the maritime ecotourism feasibility based on community; and (3) to design a management of maritime ecotourism based on community in Pasi Gusung Island, Selayar Archipelago Regency.

The research used the quantitative research based on the analysis of Geographical Information System (GIS) combined with the qualitative research based on the survey results and structural interviews. Finally, it was analyzed using AHP Method, and the management strategy used SWOT Approach.

The research results indicated that based on the owned ecological potentials, the design for the ecotourism zone of Pasi Gusung Island had met the feasibility criteria or could be categorized as S2 which could be made as the maritime ecotourism of diving and snorkeling by considering several parameters suitable for tourism. Pasi Gusung Island had the feasibility of biophysical condition as the ecosystem of coral reef in order to manage the maritime ecotourism, for good diving and snorkeling tourism. The mean closing of living coral reef was 65.25%, and that could be categorized as good. The main strategy of the management of the community based maritime ecotourism based on AHP analysis as SWOT analysis showed that the comparative total ratio of IFE was higher than EFE : 4.98 : 4.32.

This indicated that the strategy was at kuadrant 1, with the strategy of SO (Strength-Opportunity). The strategy SO included the formation of the management structure of ecotourism area, the composing of the management manual based on community, the development of household-scale tourism industry, the mapping of the power sources, the improvement of capacity in the form of diving training for the community, and the establishment of the online information center in order to increase the visiting number of tourists.

Keywords: maritime ecotourism, community based, coral reef ecosystem, GIS analysis, AHP analysis, SWOT analysis, strategy



DAFTAR ISI

	Halaman.
SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6



D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Kawasan Konservasi.....	9
B. Defenisi Pulau Kecil.....	13
C. Pemberdayaan Masyarakat Lokal.....	14
D. Defenisi Geographic Information System (GIS).....	15
E. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K)	16
F. Konsep Ekowisata.....	21
G. Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat.....	25
H. Partisipasi Masyarakat Lokal.....	28
I. Analisis GIS.....	29
J. Analytical Hierarchi Process (AHP)	31
K. Analisis SWOT.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat.....	36
--------------------------	----



B. Alat dan Bahan.....	37
C. Metodologi Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	41
E.1 Analisis GIS.....	41
E.2 Kesesuaian Kawasan Wisata Bahari Selam (Diving) dan Snorkeling.....	42
E.3 Indeks Kesesuaian Wisata.....	46
E.4 Pengolahan dan Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata.....	46
E.5 Pengolahan dan Analisis Kesiapan CBE.....	50
E.6 Pengolahan Data AHP (<i>Analitycal Hierarchy Process</i>).....	55
E.7 Pengolahan Data dan Analisis Strategi Pengembangan SWOT.....	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi.....	63
A.1 Kondisi Penduduk.....	63



A.2	Aksesibilitas.....	65
A.3	Fasilitas Sarana dan Prasarana.....	66
A.4	Sumber Air Bersih.....	67
B.	Kondisi Ekologi dan Ekosistem.....	67
B.1	Terumbu Karang.....	67
B.2	Ikan Karang.....	70
C.	Parameter Oseanografi Perairan.....	72
C.1	Suhu dan Salinitas.....	73
C.2	Kedalaman dan Kecerahan.....	74
C.3	Kecepatan Arus.....	75
C.4	Pasang Surut.....	75
D.	Analisis GIS Kelayakan Wisata Pantai, Diving dan Snorkeling.....	76
D.1	Kesesuaian Diving.....	76
D.2	Kesesuaian Snorkeling.....	79



D.3 Analisis Hirarki Proses (AHP).....	80
D.4 Analisis SWOT Strategis Pengelolaan Wisata Bahari Pulau Pasi Gusung.....	82
D.5 Penilaian Internal dan Eksternal Factor Evaluation (IFE dan EFE).....	90
D.6 Perangkingan Strategi Prioritas.....	94
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan.....	98
Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN..	



DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman.
1.	Alat dan bahan yang digunakan.....	37
2.	Kategori Lifeform yang digunakan dalam penelitian.....	39
3.	Kondisi Terumbu Karang berdasarkan persentase tutupan karang hidup.....	40
4.	Matriks kesesuaian wisata bahari kategori wisata diving....	43
5.	Matriks kesesuaian wisata bahari ketegori snorkeling.....	44
6.	Kriteria kesiapan masyarakat dalam pengembangan ekowisata (karakteristik masyarakat).....	47
7.	Kriteria kesiapan masyarakat dalam pengembangan ekowisata (persepsi masyarakat).....	48
8.	Kriteria kesiapan masyarakat dalam pengembangan ekowisata (partisipasi dan keinginan masyarakat).....	50
9.	Kriteria penilaian kesiapan pengembangan cbe (aspek sosial ekonomi).....	51
10.	Kriteria penilaian kesiapan pengembangan cbe (aspek sosial budaya).....	52
11.	Kriteria penilaian kesiapan pengembangan cbe (aspek lingkungan).....	53
	Kriteria penilaian kesiapan pengembangan cbe	



	(aspek pengelolaan).....	54
13.	Jumlah penduduk yang terdapat pada tiga desa di Pulau Pasi Gusung.....	64
14.	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tiga desa di Pulau Pasi Gusung.....	66
15.	Persentase tutupan karang di Pulau Pasi Gusung.....	68
16.	Kondisi Oseanografi Perairan Pulau Pasi Gusung.....	72
17.	Hasil Kesesuaian Wisata Bahari untuk Diving.....	79
18.	Hasil kesesuaian Wisata Bahari Untuk Snorkelling.....	80
19.	Matriks Internal Factors Evaluations (IFE) pengelolaan Kawasan wisata bahari di Pulau Pasi Gusung.....	91
20.	Matriks Eksternal Factors Evaluations (EFE) pengelolaan Kawasan wisata bahari di Pulau Pasi Gusung.....	92



DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman.
1.	Diagram Input Output Kerangka Pikir Penelitian.....	8
2.	Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata.	29
3.	Peta Lokasi Penelitian.....	36
4.	Tranportasi laut katinting / ojek perahu yang merupakan angkutan ke pulau Pasi Gusung.....	65
5.	Kategori Life form karang.....	70
6.	Pasang surut yang teramati di Pulau Pasi dalam 48 jam pengamatan.....	76
7.	Overlay Kesesuaian Wisata Bahari untuk Diving dan Snorkeling.....	77
8.	Analisis AHP.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman.
1.	Data karang.....	106
2.	Ikan Karang.....	107
3.	Organisme Benthos.....	108
4.	Bagan AHP.....	109
5.	Perbandingan Parameter AHP.....	110
6.	Analisis dan Uji konsistensi nilai CR.....	111
7.	Hasil Parameter kunci AHP.....	112
8.	Tabulasi Kesesuaian Wisata Selam (Diving).....	114
9.	Tabulasi Kesesuaian Wisata Snorkeling.....	115
10.	Strategi pengelolaan dan Matriks SWOT.....	116
11.	Dokumentasi dan foto penelitian.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta memiliki garis pantai sekitar 95.181 km. Dengan luas daratan sekitar 1,9 juta km², maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km² wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE). Karena realitas seperti ini, Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya kelautan, yang terdiri dari sumber daya alam dapat pulih (renewable resources), sumber daya alam tidak dapat pulih (non-renewable resources), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar. Sumber daya kelautan dapat pulih diantaranya ekosistem terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove dan berbagai jenis ikan (Nontji, 2002).

Sumber daya kelautan tidak dapat pulih meliputi minyak bumi dan gas, mineral dan bahan tambang/galian. Potensi sumber energi kelautan dapat berasal dari pasang surut, angin, gelombang, dan ocean thermal energy conversion (OTEC), sedangkan salah satu jasa lingkungan kelautan yang sangat prospektif mendukung perekonomian masyarakat adalah pengembangan pariwisata bahari dan jasa perhubungan laut.

Karena populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam pesisir semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumber daya pesisir



dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam tersebut bagi generasi mendatang. Maka diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dan kesinambungan ketersediaan sumber daya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya.

Salah satu alat pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang efektif adalah dengan mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), yaitu mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Kawasan Konservasi Perairan Daerah berfungsi mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumber daya ikan, maka pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan. Salah satu wilayah yang dirujuk sebagai kawasan konservasi perairan daerah adalah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten bergugus kepulauan di Propinsi Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari Pulau Sulawesi. Pada tanggal 29 November 2008 atau bertepatan perayaan ulang tahun Kabupaten Selayar yang ke 403, kabupaten ini



resmi mengganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilandasi semangat dan jiwa bahari. Sebagai kabupaten kepulauan, Selayar memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Salah satu potensi yang dimiliki adalah sumber daya terumbu karang yang tersebar di sepanjang pesisir pulau-pulau. Hasil study baseline ekologi terumbu karang Kabupaten Selayar oleh CRITC-LIPI (2006) mencatat bahwa terdapat sekitar 126 jenis karang batu yang termasuk dalam 14 suku dan terdapat sekitar 266 jenis ikan karang yang termasuk dalam 37 suku. Rerata tingkat tutupan karang hidup sebesar 27,44% atau berkisar antara 25 - 49% atau dapat dikatakan “cukup”.

Panjang garis pantai kurang lebih 670 km dan luas wilayah 10.503,69 km² yang terdiri dari luas wilayah laut kurang lebih 9.146.66 km² (87,08%) sedangkan luas wilayah daratnya 1.357.03 km (12,92%). Jumlah pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar 130 buah, dari jumlah tersebut 33 buah pulau yang berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Daerah ini berada pada ketinggian di atas permukaan laut antara 0-500 m. Tingkat ketinggian dataran di daerah ini didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 m di atas permukaan laut. Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi geografis 5° 42'-7° 35' Lintang Selatan dan 120° 15'-122° 30' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Nusa Tenggara Timur



Secara administrasi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi sebelas wilayah kecamatan dengan perincian enam kecamatan di wilayah daratan Pulau Selayar dan lima kecamatan di wilayah kepulauan dengan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2009 sebanyak 121.749 jiwa (BPS, 2010).

Pulau Pasi dan Pulau Gusung yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi geografis $6^{\circ}5' - 6^{\circ}13' \text{ LS}$ dan $120^{\circ}23' - 120^{\circ}27' \text{ BT}$ terletak di sebelah barat Pulau Selayar. Kedua pulau ini dipisahkan oleh hutan mangrove yang tumbuh lebat diantara keduanya, sehingga ketika air surut atau dilihat dari udara, kedua pulau ini seperti saling terhubung atau bersambung. Pulau Pasi merupakan salah satu pulau yang secara geografis dekat dengan mainland (Pulau Selayar) yang secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pulau Pasi Gusung memiliki luas $\pm 2.388,78 \text{ Ha}$ dengan panjang garis pantai $\pm 29,5 \text{ km}$, mata pencaharian masyarakatnya didominasi oleh nelayan dan petani (PPTK UNHAS, 2007). Pulau ini berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari daratan Pulau Selayar, dapat ditempuh melalui jalur laut selama ± 20 menit dengan menggunakan kapal tradisional (jarangka). Pulau Pasi Gusung memiliki luas mangrove 66,62 ha, terumbu karang 408,36 ha, terumbu karang bercampur dengan pasir 603,61 ha, padang lamun bercampur pasir 799,53 ha, pasir tergenang air laut 171,32 ha, hamparan pasir putih di pantai, pemukiman 25,99 ha, kebun/kelapa. Terdapat tiga ekosistem utama



pada perairan P. Pasi Gusung yaitu terumbu karang, mangrove dan padang lamun. Pulau ini memiliki banyak potensi wisata bahari untuk dikembangkan, seperti wisata penyelaman dan snorkeling, wisata penangkapan dan kegiatan kenelayanan.

Sebagai pulau yang dirujuk sebagai kawasan wisata, tentu saja aspek ekonomi masyarakat yang ada di wilayah tersebut merupakan indikator penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu aktifitas selain pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang dirujuk sebagai kawasan konservasi laut. Untuk itu kajian tentang pengembangan kegiatan wisata khususnya kegiatan ekowisata bahari yang berbasis masyarakat menjadi sangat penting dilakukan di wilayah ini. Luaran dari penelitian ini adalah strategi kebijakan kegiatan ekowisata bahari berbasis masyarakat yang dilakukan di kawasan konservasi perairan daerah yang mendukung serta meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat dan pemulihan ekosistem sumber daya dapat terjaga.

B. Rumusan Masalah

Untuk penetapan kawasan konservasi perairan daerah Pulau Pasi Gusung oleh Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 466/IX/Tahun 2011, tanggal 19 September 2011 merupakan langkah bijak yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya pelestarian sumber daya pesisir dan laut.

Kajian penelitian yang dilakukan di Pulau Pasi Gusung sebelumnya (DKP, ... nya mampu memberikan rekomendasi tentang kelayakan perairan P. ... sung sebagai kawasan konservasi perairan daerah dan sebagai



kawasan pemanfaatan perikanan berkelanjutan khususnya kegiatan wisata. Namun belum ditetapkan tentang zonasi pengelolaan kegiatan wisata yang sesuai di wilayah tersebut. Luasan kawasan konservasi laut seharusnya memperhatikan integritas ekosistem yang akan dilindungi. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Luasan KKPD (Kawasan Konservasi Perairan Daerah) yang diharapkan dapat mencakup keseluruhan aktifitas ekowisata bahari dari pulau tersebut.
2. Belum adanya pembagian zonasi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah berbasis masyarakat di Pulau Pasi Gusung.
3. Keterbatasan data dan informasi aktual tentang kondisi biofisik perairan Pulau Pasi Gusung sebagai bahan penyusunan zonasi pengelolaan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
4. Belum adanya kajian strategi kebijakan pengelolaan ekowisata bahari berbasis masyarakat di Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Strategi Pengelolaan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat di Kawasan Konservasi P. Pasi Gusung ini adalah :

1. Mendesain zonasi ekowisata bahari yang sesuai di wilayah Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan potensi ekologi yang dimiliki.



2. Mengkaji kelayakan ekowisata bahari yang berbasis masyarakat di wilayah P. Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Membuat Strategi pengelolaan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat di P. Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dasar untuk melakukan kebijakan dalam pengelolaan aktifitas ekowisata bahari khususnya bagi akademisi dan pemerintah daerah terkait serta memberikan masukan bagi pengembangan KKPD (Kawasan Konservasi Perairan Daerah) terkait dengan zonasi kesesuaian lahan di Pulau Pasi Gusung.

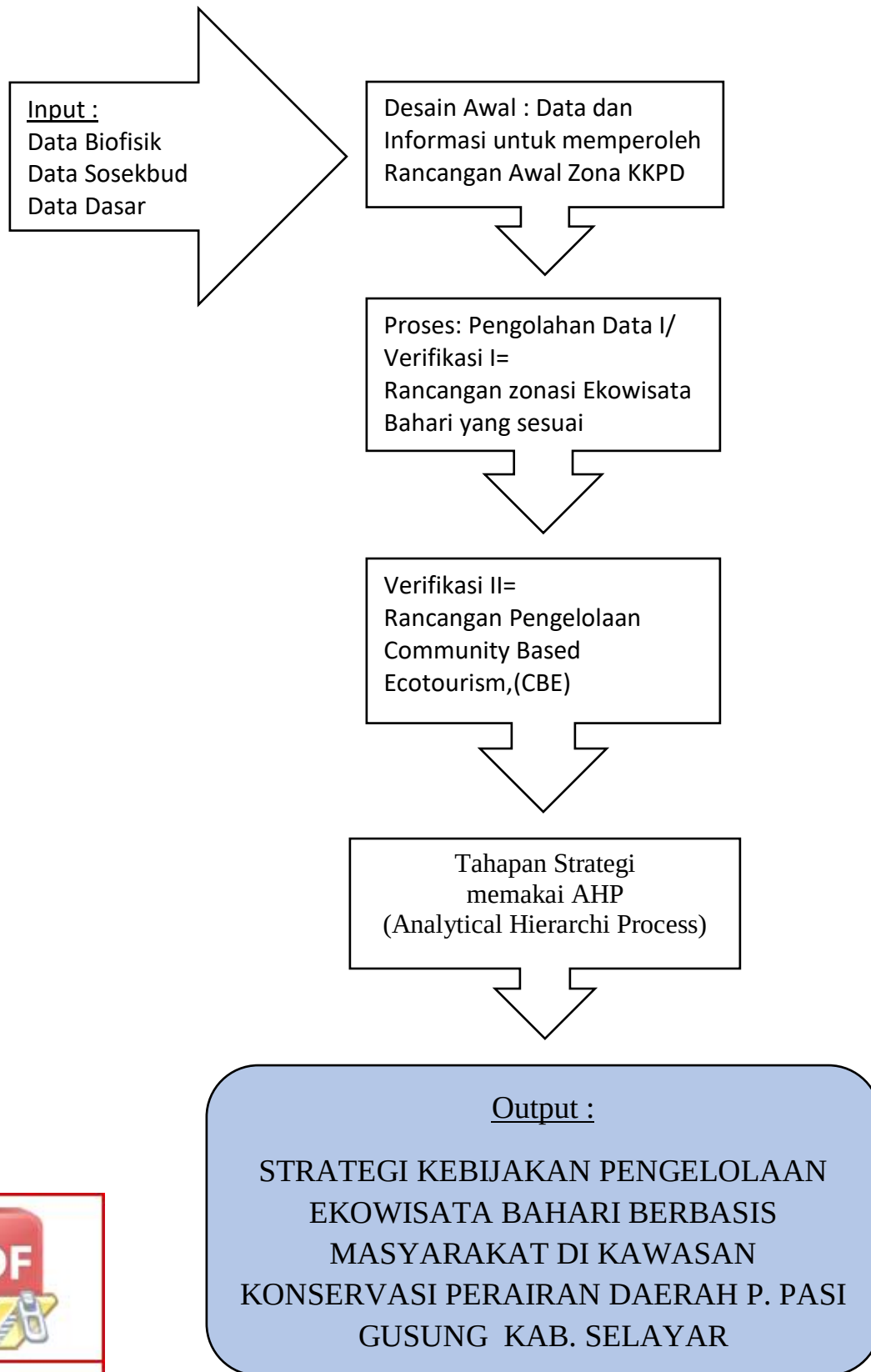
E. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini memiliki cakupan khusus di wilayah Pulau Pasi Gusung beserta kajian zonasi dilakukan hanya pada kesesuaian peruntukan ekowisata bahari meliputi snorkeling dan penyelaman (diving).

a. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa diagram input dan output yang dibangun seperti pada Gambar 1.





Gambar 1. Diagram Input Output Kerangka Pikir Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Kawasan Konservasi

Sejarah kawasan konservasi di Indonesia bisa dibedakan ke dalam 4 (empat) periode, ialah: (1) *pra-kolonial*; (2) periode *kolonial* Belanda, (3) periode kemerdekaan, dan (4) periode reformasi. Sejarah kawasan konservasi selama periode *kolonial* hampir terlupakan, melalui peninggalan kawasan konservasi jaman *pra-kolonial* bisa bertahan sampai saat ini walaupun tanpa aturan tertulis dan tanpa pengukuhan melalui aturan formal oleh pemerintah. Sebaliknya, banyak kawasan konservasi formal yang dibangun selama masa kemerdekaan dan era reformasi tidak dipatuhi oleh masyarakat – sebagian dari kawasan tersebut bahkan dijaga ketat oleh aparat keamanan yang terlatih (KKP, 2013).

Jaman *pra-kolonial*, konservasi tumbuh dari dua tipe warisan perilaku yang berbeda. Perilaku pertama ialah adanya tempat-tempat yang dikeramatkan (sakral) yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Aturan ini terbentuk dengan sendirinya dan dipatuhi oleh masyarakat di sekitarnya. Setiap orang yang bertamu ke dalam suatu wilayah, biasanya akan bertanya tentang kondisi desa, termasuk perilaku (tabu) yang tidak boleh dilakukan dan tempat-tempat yang tidak boleh didatangi (keramat). Jika hal ini dilanggar,

desa akan segera menegur dan bahkan ketakutan karena sudah terjadi pelanggaran aturan, yang mereka patuhi secara turun temurun. Di laut, lokasi yang sering disebut dengan istilah “*fish sanctuary*”. Dia berpeluang



menjadi KKP secara alami, dan melalui mekanisme *spill-over* serta *ekspor-larva*, memperbaharui (*replenish*) perikanan tangkap di sekitarnya (KKP, 2013). Menghindar dari perilaku tabu inilah yang kemungkinan menjadi kata kunci keberhasilan kawasan konservasi yang terbangun sejak jaman pra-kolonial di Indonesia. Perilaku kedua ialah adanya kesepakatan di dalam masyarakat, antara kepala kelompok dengan anggota kelompok, untuk melindungi suatu wilayah dengan segala isinya. Perilaku ini tumbuh dari keinginan bersama, bukan dari pandangan tabu. Kepala kelompok mendapat wewenang untuk mengawasi dan menegakkan aturan, termasuk menentukan hukuman terhadap pelanggaran aturan konservasi. Pada beberapa kasus, sanksi sosial sudah ditentukan dalam kesepakatan (KKP, 2013)

Jaman kolonial Belanda, inisiatif konservasi bisa berasal dari individu maupun pemerintah. Pada tahun 1714 Cornelis Chastelein menulis surat wasiat untuk menyerahkan sebidang tanah (hutan) di Depok, kepada pengikutnya. Namun hutan tersebut harus dilindungi sebagai kawasan konservasi, untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Sebagai gantinya, Chastelein memberikan sebidang tanah lainnya dan bisa dimanfaatkan oleh pengikutnya. Pengikut Chastelein, sekarang mendirikan *Lembaga Cornelis Chastelein* (LCC) untuk mengenang jasa Chastelein. Pada tahun 1889, Direktur Lands Plantentuin (sekarang menjadi Kebun Raya Bogor), mengusulkan kawasan hutan Cibodas untuk dilindungi, untuk tujuan penelitian. Kawasan ini diperluas pada tahun 1925, mencakup Gunung Gede dan Pangrango. Sekarang, kawasan tersebut menjadi



Taman Nasional Gede Pangrango, kawasan yang bertujuan untuk melindungi persediaan air di wilayah perkotaan (Jakarta). Pada tahun 1932, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan *Natuur Monumenten Ordonatie* atau Ordonasi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Sejak saat itu konservasi secara hukum mulai diterapkan. Namun kawasan konservasi selalu berada di darat, sementara pengetahuan dan kemajuan di bidang pesisir dan kelautan sangat jauh tertinggal. Pada era kemerdekaan, Pemerintah Indonesia (Departemen Kehutanan) bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk membangun sekolah khusus bagi praktisi konservasi di Indonesia. Sekolah ini disebut *School of Environment and Conservation Management* (SECM) yang berlokasi di Bogor. Lulusan dari SECM inilah yang pada umumnya menjadi pengelola hampir semua kawasan konservasi di Indonesia. Namun mulai tahun 1994, SECM harus ditutup oleh Pemerintah Indonesia karena anggaran yang terbatas. Pada saat yang sama jumlah dan luas kawasan konservasi terus meningkat, dan sebagian dari lulusan SECM saat ini sudah mengalami purna tugas. Setelah periode kekosongan selama hampir 13 tahun, Pemerintah Indonesia mulai merasakan pentingnya SECM dan bekerja sama dengan Pemerintah Korea untuk membuka kembali sekolah tersebut. SECM dianggap sangat berhasil dalam mendidik tenaga praktisi dan pengelola kawasan konservasi di Indonesia (KKP, 2013)

Sebelum era reformasi, ada beberapa inisiatif masyarakat desa pesisir melindungi wilayah di laut dengan tujuan memperbaiki perikanan. Istilah yang umum digunakan ketika itu ialah Daerah Perlindungan Laut (DPL).



Inisiatif ini didukung oleh beberapa proyek, seperti *Coastal Resource Management Project* (CRMP). Semua aktifitas pengelolaan kawasan dilakukan oleh masyarakat, yang didorong oleh proyek dan instansi pemerintah daerah. Inisiatif ini kemudian dikembangkan oleh beberapa program berikutnya, seperti COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) (Coremap II-LIPI, 2006).

Pada awal era reformasi, reformasi hukum tersebut juga terjadi dalam bidang konservasi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 ialah peraturan pertama yang memberi wewenang pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan kepada insitusi selain Departemen Kehutanan. Pada saat yang sama, melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah mendapat wewenang untuk mengelola kawasan konservasi. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengelola kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Jadi, pada era reformasi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) jenis Undang-Undang terkait dengan kawasan konservasi (Coremap II-LIPI, 2006).

Menurut KKP (2013), proses pembentukan kawasan konservasi sangat beragam, tergantung dari: kondisi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dari negara bersangkutan, perangkat hukum dan kebijakan, dan kesadaran akan kebutuhan bersama untuk mencadangkan sebagian wilayah

kawasan yang dilindungi. Namun, paling tidak ada lima proses yang antara masing-masing kawasan, ialah: (1) inisiatif dari para pihak; (2)



seleksi berdasarkan prioritas; (3) klarifikasi atau validasi lapang; (4) pengajuan rencana, dan (5) penetapan.

B. Definisi Pulau Kecil

Pengertian pulau kecil menurut Undang-Undang 27 Tahun 2007 adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar endemic dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (catchment area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Ketiga ekosistem tersebut saling berinteraksi baik secara fisik, maupun dalam bentuk bahan organik terlarut, bahan organik partikel, migrasi fauna dan aktivitas manusia. Selain potensi terbarukan pulau-

kecil juga memiliki potensi yang tak terbarukan seperti pertambangan energi kelutan serta jasa – jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya



yaitu sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, media komunikasi, kawasan rekreasi, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya.

Selain memiliki potensi yang besar, pulau – pulau kecil memiliki kendala dan permasalahan yang cukup kompleks dalam pengelolaannya, yaitu:

- belum jelasnya definisi operasional pulau-pulau kecil
- kurangnya data dan informasi tentang pulau-pulau kecil
- kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil
- pertahanan dan keamanan
- disparitas perkembangan sosial ekonomi
- terbatasnya sarana dan prasarana dasar
- konflik kepentingan
- dan degradasi lingkungan hidup (DKP, 2003).

C. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia/masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya (WWF, 2001).

Menurut DKP, 2003, pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang tumbuh pesat belakangan ini yang sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu



masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan global dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk :

1. Melahirkan individu-individu mandiri dalam masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
3. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi akan potensi diri dan lingkungan disekitarnya dengan baik
4. Melatih dan membantu masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya.
6. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh masyarakat.

D. Definisi Geographic Information System (GIS)

Aronoff (1989) mengemukakan Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan serta menganalisis obyek-obyek dan fenomena-fenomena, dimana lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting untuk

s. SIG memiliki kemampuan untuk menguraikan fenomena di permukaan bumi ke dalam bentuk beberapa *layer* atau *coverage* data spasial.



Dengan *layer* ini, permukaan bumi dapat 'direkonstruksi' kembali atau dimodelkan dalam bentuk nyata tiga dimensi dengan menggunakan data ketinggian berikut *layer* tematik yang diperlukan. Untuk melakukan hal ini, SIG memiliki kemampuan untuk menggunakan data spasial maupun atribut secara terintegrasi, sehingga sistem ini dapat menjawab pertanyaan spasial dan non-spasial yang berkaitan dengan 1) lokasi, 2) kondisi, 3) kecenderungan, 4) pola dan 5) pemodelan.

E. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K)

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Zonasi Kawasan Konservasi merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Kawasan konservasi yang efektif perlu diwujudkan guna memberikan manfaat sosial-ekonomi-budaya bagi masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya (KKP, 2014).

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) merupakan mandat dari Undang-undang No. 31 tahun 2004 Juncto Undang-undang No. 45 tahun 2007 dan Undang-undang No. 27 tahun 2007 juncto

undang No.1 tahun 2014. Jenis KKP3K dan katagori menetapkan
kan maksud dan tujuan dari pembentukan kawasan konservasi



tersebut yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya ikan, kondisi sosial dan budaya dari kawasan tersebut (KKP, 2014).

Menurut KKP 2014, arah pembangunan lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut menunjukkan adanya kesadaran betapa pentingnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sistem ekologi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Diabaikannya salah satu dari sistem tersebut akan mempengaruhi sistem yang lain. Pembangunan yang semata-mata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagai prioritas dan meninggalkan atau mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya, akan memunculkan masalah-masalah yang kompleks.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pengelolaan kawasan konservasi pesisir adalah:

- 1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 2) UU No. 5 Tahun 1994 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati;
- 3) UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) PP No. 15 Tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif Indonesia;
- 5) PP No. 18 Tahun 1994 tentang pengusahaan pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;



- 6) PP No. 68 Tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- 7) Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 8) PP Nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan;
- 9) Peraturan Menteri KP No 17/2008 tentang kawasan konservasi di pesisir dan pulau pulau kecil.
- 10) Peraturan Menteri KP No 2/2009 tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan.

Kawasan konservasi perairan ditetapkan berdasarkan kriteria ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Kriteria ekologi meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan. Kriteria sosial budaya meliputi dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, dan kearifan lokal serta adat istiadat. Kriteria ekonomi meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.

Kriteria Ekologi

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu kawasan :

1. Mempunyai kontribusi dalam pemeliharaan proses ekologi penting atau system penyangga kehidupan. Merupakan habitat bagi satwa langka atau
- ancam punah dan melindungi keanekaragaman genetik.



2. Memiliki kealamiahannya; memiliki kondisi fisik dan biologi yang belum mengalami kerusakan dan belum mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas, baik oleh karena faktor eksternal maupun internal.
3. Memiliki keterkaitan ekologis; terdapat hubungan fungsional antar habitat ekosistem di suatu kawasan.
4. Merupakan keterwakilan; yang merefleksikan keanekaragaman hayati dari ekosistem laut dimana keanekaragaman hayati tersebut berasal.
5. Memiliki keunikan; berupa keunikan spesies, ekosistem, biodiversitas, atau bentang alam; Produktif; apakah suatu kawasan memiliki produktivitas optimal
6. Merupakan daerah ruaya; yaitu merupakan daerah migrasi bagi suatu jenis ikan atau mamalia tertentu.
7. Merupakan habitat Ikan Langka; memiliki habitat yang sesuai dan dihuni oleh ikan langka/unik/endemik/khas/dilindungi.
8. Merupakan daerah Pemijahan Ikan; merupakan habitat yang cocok dan optimal bagi ikan untuk memijah.
9. Merupakan daerah asuhan; memiliki kondisi ekosistem yang optimal bagi pertumbuhan biota.

Kriteria Sosial Dan Budaya

1. Dukungan masyarakat; kondisi ini digunakan untuk melihat apakah dukungan masyarakat terhadap kegiatan konservasi.



2. Potensi konflik kepentingan; yaitu potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam penting untuk dilihat apakah pengelolaan kawasan dapat berjalan dengan baik.
3. Potensi ancaman; yaitu faktor-faktor yang mengancam kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati dan pesisir lautan.
4. Kearifan lokal; melihat adakah pengetahuan lokal/pengetahuan tradisional yang dapat membantu kelestarian sumber daya alam.
5. Adat istiadat; yaitu melihat ada tidaknya adat dan kebiasaan masyarakat yang dapat mendukung kegiatan konservasi.

Kriteria Ekonomi

Kawasan ini digunakan untuk menilai apakah masyarakat memiliki:

1. Nilai penting perikanan; yaitu nilai penting sektor perikanan dalam suatu wilayah.
2. Potensi rekreasi dan pariwisata; yaitu melihat suatu kawasan memiliki potensi dalam rekreasi dan pariwisata yang menunjang kegiatan konservasi.
3. Estetika; yaitu berupa keindahan alamiah dari suatu perairan dan/atau biota yang memiliki daya tarik tertentu.
4. Kemudahan mencapai lokasi; melihat akses dan kemudahan dalam mencapai lokasi kawasan dari berbagai daerah.

Kategori KKP3K, terdiri dari:

Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



3. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM;
4. Sempadan Pantai

F. Konsep Ekowisata (Wisata Alam)

Wisata alam atau sering disebut juga sebagai ekowisata atau *ecotourism* juga adalah suatu perjalanan menuju suatu tempat tertentu dipermukiman bumi untuk menikmati keindahan dan keajaiban alam tanpa sentuhan pembangunan. Baik berupa panorama alam, gemercik air di sungai, deburan ombak, heningnya suasana gua, hijaunya hutan dan bahkan kehidupan sosial budaya suatu masyarakat pedalaman yang belum tersentuh oleh teknologi modern (Nandi, 2005).

Ekowisata dapat dipahami sebagai perjalanan yang di sengaja ke kawasan-kawasan alamiah untuk memahami budaya dan sejarah lingkungan tersebut sambil menjaga agar keutuhan kawasan tidak berubah dan menghasilkan peluang untuk pendapatan masyarakat sekitarnya sehingga mereka merasakan manfaat dari upaya pelestarian sumber daya alam (Astriani, 2008).

Ekowisata alam di dalam kawasan konservasi bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati ekosistemnya dan memperoleh penghasilan untuk kepentingan kawasan, masyarakat lokal, pemerintah daerah dan pengelola. Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam melakukan

naan kegiatan pembangunan secara mandiri, diharapkan mampu timalkan setiap sumber daya yang dimiliki bagi pembangunan yang



berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut dalam pengelolaan sumber daya khususnya sumber daya alam yang berwawasan lingkungan berupa pengembangan wisata alam maupun ekowisata yang berbasis pada penguatan peran daerah dan masyarakat (Latupapua, 2008).

Ekowisata atau wisata ekologi adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati: pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini, dengan menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem, serta melibatkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat (Dawi, 2008).

Fennell (2001) mendefinisikan ekowisata sebagai kegiatan wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, dikelola dengan sistem pengelolaan tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah pada lingkungan. Ekowisata tidak bersifat konsumtif dan berorientasi lokal (dalam hal kontrol, manfaat/keuntungan yang dapat diambil dari skala usaha). Sedangkan Fandeli (2000) mendefinisikan bahwa ekowisata sebagai kegiatan wisata bertanggung-jawab yang berbasis utama pada kegiatan wisata alam, dengan mengikutsertakan pula sebagian kegiatan wisata budaya.

Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumber daya pariwisata. Berdasarkan hal ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni ekowisata sebagai produk, ekowisata



sebagai pasar dan ekowisata sebagai pendekatan pengembangan (Merk, 1999). Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya- upaya pelestarian lingkungan. Menurut Nugroho (2011), ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Suwantoro (2004), mengungkapkan beberapa kriteria lagi yang menjadi pertimbangan untuk memilih produk-produk ekowisata, yakni:

- 1) Aspek pendidikan dan informasi. Wisatawan biasanya mempelajari lebih dahulu latar belakang sosial dan budaya masyarakat di daerah tujuan sebelum mereka memilih daerah tujuan wisata itu. Lebih dari 50 persen wisatawan Amerika dan Inggris mengaku menikmati pengalaman yang lebih baik dalam perjalanan ketika mereka sebelumnya mempelajari kebiasaan–kebiasaan, budaya, lingkungan, dan geografi masyarakat di negara tujuan.
- 2) Aspek sosial budaya daerah tujuan wisata. Wisatawan menaruh perhatian besar pada budaya masyarakat di daerah tujuan wisata.
- 3) Aspek lingkungan. Seperti disebutkan di atas, aspek lingkungan yang alamiah pada produk wisata menjadi incaran sebagian besar wisatawan global, mulai dari Amerika Utara sampai Eropa.



- 4) Aspek estetika. Keindahan dan otensitas daya tarik wisata merupakan kebutuhan yang elementer dalam berwisata. Konservasi ODTW menjadi penting dalam ekowisata.
- 5) Aspek etika dan reputasi. Meskipun iklim, biaya dan daya tarik menjadi kriteria pilihan berwisata, namun wisatawan sangat peduli pada etika kebijakan dan pengelolaan lingkungan.

Damanik dan Weber (2006) menyebutkan beberapa prinsip ekowisata yang dapat diidentifikasi dari beberapa definisi ekowisata di atas, yaitu:

- 1) Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan ekowisata.
- 2) Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisatawan lainnya.
- 3) Menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi objek dan daya tarik wisata.
- 4) Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.
- 5) Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal.



- 6) Meningkatkan kepekaan terhadap situasi social, lingkungan dan politik daerah tujuan wisata, dan
- 7) Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi serta tunduk pada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

G. Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat

Masyarakat sebagai salah satu unsur penting dibutuhkan keterlibatannya secara langsung dalam penataan kawasan wisata. Proses keterlibatan masyarakat tergantung dari potensi dan kemampuan yang ada. Suwanto (2004) menyatakan, masyarakat di sekitar objek dan daya tarik wisata berperan penting tidak hanya dalam proses pelaksanaan wisata secara langsung tetapi juga dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut nantinya. Peran masyarakat dibutuhkan dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi wisatawan dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar agar wisata dapat terus berjalan, oleh karena itu penting untuk menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang sadar wisata. Masyarakat sadar wisata adalah masyarakat yang mengetahui dan menyadari apa yang dikerjakan dan juga masalah-masalah yang dihadapi untuk membangun dunia pariwisata nasional. Dengan adanya kesadaran ini maka akan berkembang pemahaman dan pengertian proporsional di antara berbagai pihak yang pada gilirannya akan



mendorong masyarakat untuk mau berperan serta dalam pembangunan (Suwantoro 2004).

Denman (2001) menjelaskan bahwa ekowisata berbasis masyarakat dapat membantu memelihara penggunaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Lebih dari itu ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial ekowisata sebagai suatu langkah lebih lanjut dengan mengembangkan bentuk ekowisata menempatkan masyarakat lokal yang mempunyai kendali penuh dan keterlibatan di dalamnya baik itu manajemen dan pengembangannya dan proporsi yang utama menyangkut sisa manfaat di dalam masyarakat. Beberapa syarat dasar dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adalah:

- 1) Lanskap atau flora fauna yang dianggap menarik bagi para pengunjung khusus atau bagi pengunjung yang lebih umum.
- 2) Ekosistem yang masih dapat menerima kedatangan jumlah tertentu tanpa menimbulkan kerusakan.
- 3) Komunitas lokal yang sadar akan kesempatan-kesempatan potensial, resiko dan perubahan yang akan terjadi serta memiliki ketertarikan untuk menerima kedatangan pengunjung.
- 4) Adanya struktur yang potensial untuk pengambilan keputusan komunitas yang efektif.
- 5) Tidak adanya ancaman yang nyata-nyata dan tidak bisa dihindari atau cegah terhadap budaya dan tradisi lokal.



- 6) Penaksiran pasar awal menunjukkan adanya permintaan yang potensial untuk ekowisata dan terdapat cara yang efektif untuk mengakses pasar tersebut.

Karakteristik yang mendasar dari ekowisata berbasis masyarakat adalah bahwa kualitas sumber daya alam dan kebudayaan setempat terjaga dan jika memungkinkan ditingkatkan oleh pengunjung (Denman 2001). Sudiyono (2008) menjelaskan pembangunan/pengembangan ekowisata dituntut untuk memberdayakan masyarakat desa, dengan menyeimbangkan nilai-nilai lingkungan dan budaya setempat. Keuntungan dari wisata harus dinikmati oleh masyarakat, dan masyarakat turut berpartisipasi sebagai pelaku, sehingga kemitraan dengan antar pihak perlu dibangun/difasilitasi seperti *tour operator*, pemandu dan pemasarannya. Model pengembangan pariwisata yang diharapkan adalah *Community Based Ecotourism* (CBE).

Elemen dasar dalam pengelolaan *Community Based Ecotourism* (CBE) yaitu:

1. Aktivitas dan pelayanan dikembangkan melalui proses "*Bottom Up*" dan anggota masyarakat aktif berpartisipasi.
2. Dikelola oleh pengurus terpilih yang mewakili masyarakat desa/kelompok bukan individu.
3. Penekanan pada pemanfaatan sumber-sumber daya lokal (alam, budaya, SDM).

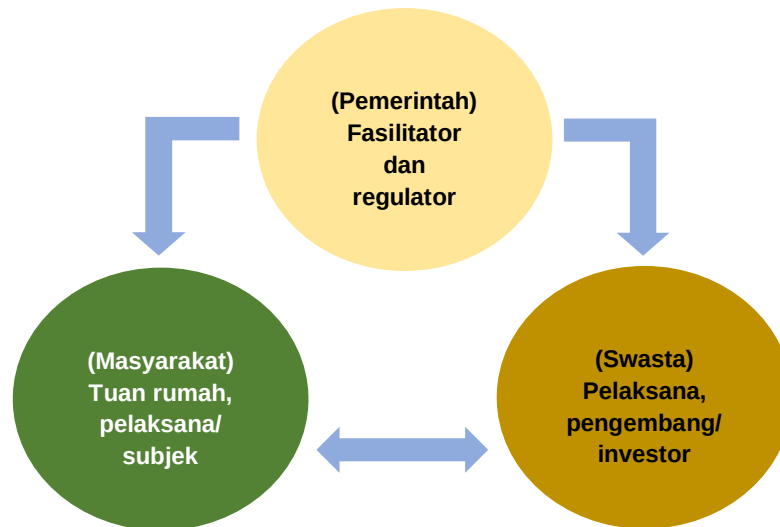


4. Proyek-proyek ke desa harus mampu mendorong masyarakat, dan bertujuan untuk mengembangkan ekonomi desa, lingkungan sosial dan budaya agar dapat berkelanjutan.
5. *Community Based Ecotourism* (CBE) sebagai pusat untuk berinteraksi antar tamu dengan tuan rumah baik pengetahuan/pengalaman tentang budaya dan lingkungan.

H. Partisipasi Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Ilustrasi yang dikemukakan Wearing (2001) tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.





Gambar 2. Diagram Pemangku Kepentingan dalam pengembangan pariwisata

Menurut Timothy (1999) ada dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Kedua perspektif tersebut adalah (1) partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan (2) berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan serta kemampuannya dalam menyerap manfaat pariwisata. Partisipasi yang efektif akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan pengawasan program pengembangan desa wisata.

I. Analisis GIS

Analisis Gis merupakan penggabungan dan modifikasi 2 software yang dikenal sebelumnya yaitu Arcview 3.3 dan Arc/INFO Workstation 7.2. Saat ini ESRI terus meningkatkan kemampuan ArcGis (Wahana, 2015).



Karena sdh meliputi perangkat lunak ArcGis telah berbasis windows antara lain:

- ArcReader, yang memungkinkan penggunanya menampilkan peta yang dibuat menggunakan produk ArcGis lainnya
- ArcGis Desktop, memiliki lima tingkatan lisensi :
 - **ArcView**, yang memungkinkan penggunanya menampilkan data spasial, membuat peta berlapis, serta melakukan analisis data spasial.
 - **ArcMap**, aplikasi utama untuk kebanyakan proses GIS dan pemetaan computer dan memiliki kemampuan utama untuk visualisasi, membangun database spasial baru, memilih (query), editing, menciptakan design – design peta analisis dan pembuatan tampilan akhir dalam laporan – laporan kegiatan.
 - **ArcEditor**, memiliki kemampuan ArcView dengan tambahan tools memanipulasi berkas shapefile dan geodatabase.
 - **ArcInfo**, memiliki kemampuan sebagaimana ArcEditor dengan tambahan fungsi penyuntingan, analisis dan manipulasi data.
 - **ArcCatalog**, tool untuk menjelajah (browsing).



J. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analisis Hirarki Proses (AHP) merupakan suatu proses untuk menguraikan system yang kompleks menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana. AHP merupakan metode yang memandang masalah sebagai suatu kerangka kompleks yang terorganisir, di mana terdapat interaksi dan saling ketergantungan antarfaktor (Tuwo, 2011). Metode yang pertama kali diperkenalkan oleh Thomass L. Saaty (Saaty, 1993) ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu: (1) hirarki yang mewakili system dapat menerangkan bagaimana prioritas pada level yang lebih tinggi dapat mempengaruhi prioritas pada level di bawahnya; (2) hirarki memberikan informasi rinci mengenai struktur dan tujuan pada level yang lebih tinggi; (3) system alamiah akan efisien disusun dalam bentuk hirarki dibandingkan dengan disusun dalam bentuk lain; dan (4) bersifat stabil dan fleksibel; stabil dalam arti perubahan yang kecil tidak banyak mempengaruhi hirarki; sedangkan fleksibel dalam artian bahwa penambahan elemen pada struktur yang telah tersusun baik tidak akan mengganggu unjuk kerjanya.

AHP memasukkan aspek kualitatif dan kuantitatif pikiran manusia, di mana aspek kualitas digunakan untuk mendefinisikan persoalan dan hirarkinya, sedangkan aspek kuantitatif untuk mengekspresikan penilaian dan preferensi secara singkat dan padat.

Pada dasarnya metode ini memecah-mecah situasi yang kompleks, tak ur, ke dalam bagian-bagian komponennya; menata bagian atau ini dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada



pertimbangan subjektif tentang relative pentingnya setiap variable; dan mensintesis berbagai pertimbangan untuk menetapkan variable mana yang memiliki prioritas tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut (Saaty, 1993). Penyelesaian masalah dengan AHP harus menerapkan prinsip *decomposition, comparative, judgement, synthesis of priority*, dan *logical consistency* (Mulyono, 1996).

Metode yang sederhana dan fleksibel menampung kreatifitas dalam rancangannya terhadap suatu masalah membuat AHP dianggap sesuai dengan masing-masing pemakai. AHP bahkan dapat berfungsi tanpa data keras, dengan syarat bahwa pemakai memiliki batas pemahaman memadai berdasarkan pada analisis logis eksplisit. AHP memiliki tiga prinsip, yaitu: prinsip penyusunan hirarki, prinsip penetapan prioritas, dan prinsip konsistensi logis (Tuwo, 2011).

Prinsip penyusunan hirarki adalah memadukan antara pengidentifikasian elemen-elemen suatu persoalan, pengelompokan ke dalam komponen yang homogen, dan penataan kumpulan-kumpulan tersebut pada tingkat-tingkat berbeda. Ancangan dalam penyusunan hirarki tergantung pada jenis keputusan yang perlu diambil. Dalam memilih alternatif, proses AHP diawali dengan menderetkan semua alternatif di tingkat dasar. Selanjutnya adalah menempatkan berbagai kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam memilih alternatif pada deretan atas. Titik puncak ditempati hanya satu elemen atau focus atau tujuan menyeluruh.



AHP digunakan untuk menganalisis pengaruh prioritas pada level yang lebih tinggi terhadap prioritas pada level di bawahnya (Saaty, 1993). AHP dilakukan untuk mendapatkan alternatif kebijakan umum pengembangan daerah ekowisata.

Objektif atau tujuan analisis AHP adalah untuk menganalisis berbagai kriteria dan alternatif dalam pengembangan ekowisata. Kriteria yang digunakan adalah kebijakan strategi. Alternatif yang berpengaruh adalah kondisi ekosistem pesisir, social dan ekonomi, kondisi infrastruktur, dan kondisi kelembagaan masyarakat . Untuk membantu proses analisis, maka skor kualitatif pada analisis situasional juga digunakan pada AHP.

Analisis AHP pada penelitian ini digunakan untuk mengelompokkan aspek kunci yakni aspek social ekonomi, social budaya, lingkungan dan pengelolaan serta mengidentifikasi beberapa alternatif untuk mendapatkan tujuan strategi pengelolaan ekowisata bahari berbasis masyarakat pada P. Pasi Gusung.

K. Analisis SWOT

Penentuan strategi prioritas dalam pengembangan ekowisata bahari di P. Pasi menggunakan pendekatan SWOT (*strength, weakness, opportunity* dan *threat*) berdasarkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategis suatu pengelolaan. Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan (*stenght*) dan peluang (*opportunity*)



namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) (Rangkuti, 1997).

Sebelum dibuat matriks SWOT, Rangkuti (1997) menjelaskan bahwa metode SWOT terlebih dahulu ditentukan faktor strategi eksternal (EFE) dan faktor strategi internal (IFE) dengan metode sebagai berikut :

1. Menyusun kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman pada kolom 1
2. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi bobot mulai 1,00 (sangat penting) sampai 0,00 (tidak penting) berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pengembangan ekowisata bahari di Pulau Pasi
3. Menghitung rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (sangat baik) sampai 1 (buruk) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap pengembangan ekowisata di P. Pasi Gusung
4. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom untuk memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4. Hasil perkalian pada masing-masing faktor akan menjelaskan kualitasnya dengan nilai 4,00 (sangat baik) hingga 1,00 (buruk).
5. Menjumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 sehingga diperoleh total skor pembobotan. yang menunjukkan bagaimana unit analisis bereaksi terhadap faktor-faktor strategis baik eksternal maupun internalnya.

matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan



dan kelemahan yang dimiliki. Penyusunan strategi berdasarkan faktor-faktor strategi eksternal dan internal yang ada. Dari analisis SWOT diperoleh empat strategi yaitu SO, ST, WO dan WT

Setelah memperoleh empat strategi, kemudian menentukan prioritas strategi mana yang lebih diutamakan dengan cara menjumlahkan nilai kode pembobotan dari tiap strategi yang telah ditentukan dalam matriks SWOT.

